



PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DESA AS MANULEA KECAMATAN SASITAMEAN KABUPATEN MALAKA

No	Penulis	Email
1	Elfrida Elu	elfyelu85@gmail.com
2	Nofitri Ermi Seran	nofitriermiseran201@gmail.com
3	Syprianus Bai	rianbai00@gmail.com
4	Stefania Christina Naiaki	stefaniachristinanaiaki31@gmail.com
5	Yohanes Fritantus	yfritantus@gmail.com
6	Dimas Agustian	dimas.agustian.adm@unimor.ac.id
7	Marthen Patiung	patiungmarthen@yahoo.com
8	Valensia Kristanti Man	kristinman2004@gmail.com

¹⁻⁸ Universitas Timor

elfyelu85@gmail.com

Abstrak

Praktek Kerja Mahasiswa (PKM) dilaksanakan di Desa As Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, untuk menjawab permasalahan mitra berupa lemahnya sistem administrasi pemerintahan desa, kurangnya penataan informasi wilayah, serta menurunnya kualitas lingkungan akibat berkurangnya tutupan hijau. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan publik dan perencanaan pembangunan kurang efektif, serta menimbulkan kerentanan lingkungan. Kegiatan PKM dilakukan dengan metode partisipatif melalui perbaikan administrasi desa, pembuatan papan identifikasi RT/RW dan dusun, serta program reboisasi di lahan kritis. Pendekatan ini dipadukan dengan praktik lapangan, dokumentasi data, serta sosialisasi kepada masyarakat agar program berjalan aplikatif dan berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tertib administrasi, di mana data kependudukan dan pendataan wilayah desa menjadi lebih akurat dan terstruktur. Penataan informasi wilayah berhasil memperjelas batas administratif, mempermudah koordinasi, serta meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, kegiatan reboisasi dan penyuluhan lingkungan menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kelestarian alam, yang tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan dan kebersihan lingkungan. Secara keseluruhan, PKM ini tidak hanya memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa dan pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan; Administrasi Desa; Informasi Wilayah; Reboisasi; Partisipasi Masyarakat.



©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1. Pendahuluan

Desa As Manulea terletak di Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, pekebun, dan peternak. Kondisi geografis yang cukup terpencil membuat desa ini memiliki karakter sosial-budaya yang masih kuat, tetapi di sisi lain menghadapi keterbatasan aksesibilitas, sarana prasarana, dan tata kelola pemerintahan. Aparat desa masih mengalami kendala dalam

pengelolaan administrasi, pendataan wilayah, serta pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini berdampak pada efektivitas pelayanan publik, akurasi data pembangunan, dan koordinasi antarwilayah dusun. Selain itu, permasalahan lingkungan juga muncul akibat berkurangnya kawasan penghijauan, yang mengancam kelestarian sumber daya alam desa.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbaikan administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Solekhan (2012) menekankan bahwa pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel menjadi kunci pelayanan publik yang berkualitas. Sementara itu, pengelolaan informasi wilayah berbasis peta dan sistem digital terbukti mempermudah proses perencanaan pembangunan (Burrough & McDonnell, 1998; Longley, Goodchild, Maguire, & Rhind, 2005). Dalam konteks pelestarian lingkungan, kegiatan reboisasi terbukti efektif dalam mengembalikan fungsi ekologis lahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan (Odum, 2004; FAO, 2011). Dengan demikian, pengalaman akademis dan kajian literatur menegaskan perlunya integrasi perbaikan administrasi, penguatan informasi wilayah, dan program reboisasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian masyarakat melalui Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) di Desa As Manulea diarahkan pada tiga solusi utama: (1) perbaikan sistem administrasi desa agar lebih tertib, rapi, dan terstruktur; (2) penataan informasi wilayah melalui pembuatan papan identifikasi RT/RW dan dusun untuk mendukung transparansi data dan perencanaan pembangunan; serta (3) kegiatan reboisasi di lahan kritis untuk memulihkan kawasan penghijauan desa. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat dan aparat desa sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga hasilnya dapat berkelanjutan. Tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa, memperkuat sistem informasi wilayah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercapai tata kelola desa yang lebih baik, lingkungan yang lebih lestari, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan PKM di Desa As Manulea menggunakan pendekatan partisipatif, di mana mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat terlibat secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa setiap program sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus dapat berkelanjutan setelah kegiatan berakhir. Kegiatan yang dilakukan meliputi perbaikan administrasi desa dengan membenahi dokumen, pengarsipan data, serta pembaruan informasi kependudukan, RT/RW, dan dusun. Selanjutnya, dilakukan penataan informasi wilayah melalui pembuatan papan nama RT, RW, dan dusun untuk

memperjelas batas administratif serta mempermudah koordinasi dan pelayanan publik. Program reboisasi juga dilaksanakan dengan menanam bibit pohon di lahan kritis dan sekitar sumber mata air, disertai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan.

Pelaksanaan program berlangsung selama satu bulan, mulai pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus 2025. Pada minggu pertama dilakukan orientasi dan pengumpulan data awal, minggu kedua difokuskan pada perbaikan administrasi, minggu ketiga pada penataan informasi wilayah dan reboisasi, serta minggu keempat pada evaluasi kegiatan dan presentasi hasil. Lokasi kegiatan meliputi sepuluh dusun di Desa As Manulea, yaitu Loleon, Lootnana, Balibo, Banhae, Nontoen, Kakase A, Kakase B, Kakase C, Kakase D, dan Feunana. Dengan metode ini, PKM tidak hanya memberikan solusi praktis terhadap permasalahan administrasi dan lingkungan desa, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kegiatan Pegabdian.

Pelaksanaan PKM di Desa As Manulea dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Fokus kegiatan mencakup tiga bidang utama, yaitu **perbaikan administrasi desa, penataan informasi wilayah, dan reboisasi/pelestarian lingkungan.**

Gambar 1.

Dokumentasi Mahasiswa PKM Saat Diterima oleh
Pemerintah Desa As Manulea.



Sumber : Kantor Desa As Manulea, 17 Juli 2025.

Gambar ini memperlihatkan suasana penerimaan mahasiswa PKM oleh Kepala Desa beserta perangkat desa. Momen ini menjadi titik awal pelaksanaan program pengabdian, di mana terjadi dialog antara mahasiswa dan pihak desa mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kehadiran mahasiswa disambut positif oleh pemerintah desa, yang kemudian memberikan arahan sekaligus dukungan penuh terhadap program yang dirancang. Dokumentasi

ini menegaskan adanya kerja sama resmi yang menjadi dasar keberhasilan PKM di Desa As Manulea.

3.2. Hasil Kegiatan Pengabdian.

3.2.1. Perbaikan Administrasi Desa

Hasil kegiatan perbaikan administrasi terlihat nyata pada tertatanya kembali dokumen kependudukan, arsip desa, serta data RT/RW. Sebelum PKM, perangkat desa mengalami kesulitan saat mencari arsip karena penataan dokumen yang masih bercampur. Melalui PKM, mahasiswa membantu menyusun format pendataan baru yang lebih terstruktur, sehingga data kependudukan dapat diperbarui secara sistematis. Setiap RT dan dusun kini memiliki daftar penduduk yang lebih akurat, termasuk jumlah kepala keluarga, usia produktif, dan kondisi sosial-ekonomi.

Selain itu, perangkat desa memperoleh pengetahuan baru tentang cara menyusun laporan administrasi secara rapi. Mahasiswa tidak hanya membantu teknis penataan, tetapi juga memberikan contoh format laporan yang sederhana namun efektif. Dengan hasil ini, pelayanan administrasi kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Gambar 2.

Dokumentasi Mahasiswa Bersama Perangkat Desa Saat Memperbaiki Arsip dan Data Administrasi.



Sumber : Kantor Desa As Manulea, 25 Juli 2025.

Foto ini memperlihatkan mahasiswa membantu staf desa dalam menata ulang arsip dan menyusun format pendataan baru. Kegiatan ini bertujuan agar sistem administrasi desa lebih tertib dan mudah diakses.

3.2.2. Penataan Informasi Wilayah

Kegiatan PKM menghasilkan papan nama RT, RW, dan dusun yang dipasang di lokasi strategis desa. Sebelum PKM, batas wilayah antar dusun seringkali membingungkan warga maupun aparat karena tidak ada tanda identifikasi yang jelas. Setelah adanya papan informasi, setiap dusun kini memiliki tanda batas administratif yang resmi, sehingga koordinasi kegiatan masyarakat maupun distribusi bantuan dari pemerintah lebih terarah.

Manfaat lain yang dirasakan adalah kemudahan aparat desa dalam melakukan pendataan dan pemetaan wilayah. Dengan papan nama tersebut, setiap warga mengetahui batas wilayahnya dengan jelas, sehingga konflik kecil terkait batas tanah atau lokasi kegiatan bisa diminimalisir. Hasil ini menjadi bukti bahwa penataan informasi wilayah sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif.

Gambar 3.

Papan Nama Dusun yang Telah Dipasang di Titik Strategis Desa.



Sumber : Desa As Manulea 2025

Dokumentasi ini menunjukkan hasil nyata kegiatan penataan informasi wilayah. Dengan adanya papan informasi, batas administratif desa lebih jelas dan memudahkan koordinasi antarwarga.

3.2.3. Program Reboisasi dan Pelestarian Lingkungan

Hasil kegiatan reboisasi terlihat dari penanaman pohon di area sumber mata air dan titik-titik rawan longsor. Sebelumnya, area tersebut gundul dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan lebih parah. Setelah adanya PKM, lahan kritis mulai ditanami pohon keras yang bermanfaat menjaga kestabilan tanah dan meningkatkan cadangan air tanah. Bibit yang ditanam juga dipilih sesuai kondisi wilayah agar memiliki daya tumbuh yang tinggi.

Kegiatan reboisasi ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Partisipasi warga cukup tinggi karena mereka ikut serta dalam penanaman, penyiraman, dan pemeliharaan tanaman. Dengan demikian, hasil program ini tidak hanya berupa bertambahnya jumlah pohon, tetapi juga meningkatnya rasa tanggung jawab warga dalam menjaga kelestarian lingkungan desa.

Gambar 4.

Kegiatan Penanaman Pohon di Area Sumber Mata Air.



Sumber : Desa As Manulea, 16 Agustus 2025.

Foto ini menggambarkan partisipasi mahasiswa bersama masyarakat desa dalam menanam bibit pohon di lahan kritis. Reboisasi dilakukan untuk mencegah erosi, menjaga cadangan air, dan melestarikan lingkungan desa.

3.3. Pembahasan

Pelaksanaan PKM terbukti mampu menjawab kebutuhan mitra (Pemerintah Desa As Manulea). Kegiatan perbaikan administrasi mendukung prinsip **akuntabilitas dan transparansi** dalam good governance, di mana aparat desa kini dapat menyusun laporan dengan lebih rapi dan akurat. Pemasangan papan RT/RW dan dusun memperkuat **pengelolaan informasi wilayah**, sesuai dengan teori Longley dkk. (2005) bahwa data spasial sangat penting untuk

mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Sementara itu, reboisasi dan kegiatan pelestarian lingkungan menunjukkan implementasi prinsip **pembangunan berkelanjutan**. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan juga mendukung teori pembangunan partisipatif (Arnstein, 1969), yang menekankan pentingnya keterlibatan warga agar keberlanjutan program dapat terjaga.

Secara umum, kegiatan PKM tidak hanya menyelesaikan masalah teknis administrasi, informasi wilayah, dan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Ke depan, rencana tindak lanjut seperti digitalisasi administrasi desa dan reboisasi berkelanjutan akan semakin memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat.

3.4. Perbandingan Kondisi Pra dan Pasca PKM

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah PKM menunjukkan adanya peningkatan signifikan di berbagai aspek pemerintahan desa. Sebelum PKM, administrasi desa masih berjalan seadanya. Arsip penting tidak tertata rapi, data kependudukan banyak yang belum diperbarui. Setelah adanya kegiatan PKM, administrasi menjadi lebih tertib dan terstruktur. Aparat desa mulai terbiasa menggunakan format pendataan baru, sehingga pencatatan data kependudukan menjadi lebih mudah dan cepat diakses ketika diperlukan.

Di bidang penataan wilayah, kondisi awal menunjukkan bahwa Desa As Manulea tidak memiliki papan informasi RT, RW, dan dusun. Hal ini sering menimbulkan kebingungan dalam identifikasi batas wilayah maupun pendistribusian program pemerintah. Setelah PKM, setiap dusun kini memiliki papan informasi yang jelas. Keberadaan papan ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda wilayah administratif, tetapi juga sebagai alat bantu aparat dalam memetakan potensi desa dan merencanakan pembangunan secara lebih tepat sasaran.

Dari aspek lingkungan, sebelum PKM kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam masih tergolong rendah. Lahan kritis yang ada dibiarkan terbuka tanpa upaya pemulihan. Pasca PKM, kesadaran warga mulai tumbuh, terlihat dari partisipasi mereka dalam kegiatan reboisasi. Warga ikut menanam pohon, menyiram, serta berkomitmen memelihara tanaman agar tumbuh subur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM telah berhasil menciptakan perubahan perilaku sosial yang positif, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 1. Perbandingan Pra dan Pasca PKM

No.	Sebelum PKM	Sesudah PKM
1.	Administrasi desa masih kurang rapi dan data kependudukan tidak terbaru	Sistem administrasi lebih tertib, data kependudukan ter-update
2.	Tidak ada papan informasi RT/RW dan dusun	Terpasang papan nama RT, RW, dan dusun di 10 dusun
3.	Kesadaran masyarakat tentang reboisasi masih rendah	Masyarakat aktif ikut reboisasi dan menjaga lingkungan

Sumber : Olahan Tim PKM

Dengan demikian, perbandingan pra dan pasca PKM menunjukkan bahwa kegiatan mahasiswa benar-benar memberikan dampak konkret bagi desa. Hasil yang dicapai tidak hanya pada aspek teknis administrasi dan lingkungan, tetapi juga pada peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa program PKM telah berhasil menjawab kebutuhan mitra sesuai dengan permasalahan yang diuraikan sekaligus memberi landasan untuk pengembangan program berkelanjutan di masa depan.

4. Simpulan

Pelaksanaan PKM di Desa As Manulea berhasil menjawab permasalahan utama yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat. Pada bidang administrasi, kegiatan ini menghasilkan sistem pengarsipan yang lebih rapi, data kependudukan yang lebih akurat, serta peningkatan keterampilan aparat desa dalam menyusun laporan. Pada bidang informasi wilayah, keberadaan papan nama RT, RW, dan dusun telah memperjelas batas administratif sehingga mempermudah koordinasi antarwarga serta pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, pada bidang pelestarian lingkungan, kegiatan reboisasi di area sumber mata air dan lahan kritis telah menumbuhkan kesadaran baru masyarakat untuk menjaga kelestarian alam.

Implikasi dari kegiatan PKM ini cukup signifikan. Pemerintah desa kini memiliki kapasitas tata kelola yang lebih baik, sehingga proses perencanaan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Masyarakat juga mendapatkan manfaat langsung berupa kemudahan dalam mengakses informasi wilayah dan meningkatnya partisipasi dalam pembangunan desa. Pada aspek lingkungan, keterlibatan warga dalam reboisasi menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga sumber daya alam desa demi keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Namun, kegiatan PKM ini juga memiliki keterbatasan, khususnya terkait durasi pelaksanaan yang relatif singkat. Beberapa program seperti digitalisasi administrasi dan pemeliharaan jangka panjang bibit pohon membutuhkan waktu dan sumber daya lebih agar hasilnya maksimal. Oleh karena itu,

keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Burrough, P. A., & McDonnell, R. A. (1998). *Principles of geographical information systems*. Oxford University Press.
- Dwipayana, A. (2003). *Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis*. Pustaka Pelajar.
- Food and Agriculture Organization. (2011). *State of the world's forests 2011*. FAO.
- Febriyanto, D., dkk. (2014). *Good governance dalam konteks otonomi daerah*. Alfabeta.
- Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: The world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221. <https://doi.org/10.1007/s10708-007-9111-y>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Laporan studi tata kelola pemerintahan daerah*. KPK.
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2005). *Geographic information systems and science* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Mangara, T. H., & Yulianty, S. (2025). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SOSIAL-EKONOMI DI DESA GERENDONG. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 29–34. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v4i1.399>
- Odum, E. P. (2004). *Dasar-dasar ekologi* (Edisi Ketiga). Gadjah Mada University Press.
- Rokhim, A., Fadhilah, M., & Hidayat, R. (2024). PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN UMKM DI PURWOREJO MELALUI PELATIHAN CAPACITY BUILDING. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 36–47. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v3i4.329>
- Rosidi, I., & Fajriani, S. (2013). Prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 55–67.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Setara Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Patiung, M., Agustian, D., Regif, S. Y., Kefi, H., & Fina, Y. (2025). PENGUATAN LEMBAGA DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 30–34. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v4i2.430>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.